



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEDI SUPANDI
2. Jabatan : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3. NHK : 405353

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.367.898.200

1. Tanah dan Bangunan Seluas 167 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 182 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 928.000.000
3. Tanah Seluas 1259 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
4. Tanah Seluas 10328 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 1080 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, WARISAN Rp. 40.800.000
6. Tanah Seluas 3075 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 124.098.200
7. Tanah dan Bangunan Seluas 1400 m2/135 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 77.800.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI , LAINNYA , Rp. 2.800.000
2. MOTOR, ROYAL ENFIELD BULET CLASSIC 500 Tahun 2016, HASIL SENDIRI , LAINNYA , Rp. 75.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 150.345.400



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.713.069.338
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.309.112.938
III. HUTANG	Rp.	990.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.319.112.938

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.